

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, (Medan: USU press, 2010).
- Agus Suntoro, *Kajian terhadap UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
- Ariga Ramanda, *et.al*, *Peran Bumdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bengkel Kec. Perbaungan. Dalam: Penerapan Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, (Deli Serdang: CV Barokah Publihser, 2023).
- Asih Retno Dewi, *Penyelesaian Problem Agraria Asas Keterbukaan Dalam Pengadaan Tanah, Efektifitas Larasita, Pemberdayaan Petani, Konsep Ruang Tanah Adat, Dan Deformasi*, (Yogyakarta: STPN Press, 2016).
- Fuad Abdillah, *Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Guru Kejuruan*, (Jember: Cerdas Ulet Kreatif Publisher, 2020).
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016).
- Marulak Togatorop, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana. Jakarta : 2008).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012).

### Jurnal International/Jurnal Nasional

- Ahmad Nurofik, "Profesi dan Profesional dalam Bidang Hukum", *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 3 Juni 2024. 639-647. DOI: <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i3.1453>
- Andreas Andrie Djatmiko, *et.al*, "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 Januari 2022. 1-10. DOI: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i17.350>

- Catur Nugroho Jati, "Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor : 19/Pdt.G./2011/Pn.Ska Di Pengadilan Negeri Surakarta)", *Jurnal Verstek* Vol. 1, No. 2 September 2013. 58-67. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v1i2.38804>
- Dhaniswara K. Harjono, "Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1 Januari 2023. 14-24. DOI: <https://doi.org/10.58344/jhi.v1i2.7>
- Fireman Freddy Busroh, "Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 14, No. 1, (2017): 1-10. DOI: <https://doi.org/10.47007/lj.v14i1.1780>
- Furziah, "Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan dan Solusi", *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 2 Desember 2023. 108-115.
- Harjono, "Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Indonesia*", Vol. 2, No.1 Januari 2023. 14-24. DOI: <https://doi.org/10.58344/jhi.v1i2.7>
- Mulyadi, "Asas dan Prinsip Pengadaan Tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum", *Varia Hukum*, Vol. 38, No. 29 September 2017. 1186-1195. DOI: <https://doi.org/10.32502/jvh.v28i34.948>
- Priska Yulia Raya, "Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat", *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2014. 1-17.
- Rahmat Noor, "Meninjau Kembali Kebijakan Pengadaan Tanah: Menuju Kerangka Kerja yang Lebih Adil untuk Pengembangan Kepentingan Publik." *Serdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 3, 2024. 1-8. DOI: <https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i03.769>
- Ramanda, *et al*, "Bab VII Peran BUMDES dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bengkel Kec. Perbaungan. Penerapan Ilmu Manajemen dan Akuntansi dalam Dunia Usaha Dunia Industri", 2023. 88-103.
- R. La Porta, "Investor Protection and Corporate governance", *Jurnal Of financial Economics*, (2000): 11-18.
- Sidabariba, Burhan, *et al*, "Peranan Perusahaan Jasa Penilai Bagi Perbankan Dalam Pemberian Kredit (Studi Kantor Jasa Perusahaan Penilai Cabang Medan)",

Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4, No. 2 Oktober 2023. 240-247. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7402.240-247>

Subekti Rahayu, "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum", *Yustisia*, Vol. 5, No. 2 Juni 2016. 376-394. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754>

Suciati, S., & Amapoli, E, "Mengenal Kantor Jasa Penilai Publik: Indonesia", *Jurnal Pijar*, Vol. 1, No. 2 Juni 2023. 179-190.

Suhardi, *et al*, "Membangun Kesadaran Dan Memperkuat Keterlibatan: Merangkul Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Aset Bersama Dalam Mewujudkan Visi Kemakmuran Desa Sutawinangun, Kedawung, Cirebon". *PUBLICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 3 Agustus 2024. 96-108. DOI: <https://doi.org/10.58738/publica.v2i3.44>

Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, 2018. 1-22. DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>

Widodo Dwi Putro, "Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum", *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 1 Februari 2020. 207-29. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.42928>

### **Hasil Penelitian**

Agus Suntoro, "Kajian terhadap UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum". *Komnas HAM*, 2018.

Bambang Suyudi, "Rekonstruksi Regulasi Pemberian Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Berbasis Nilai Keadilan". *Disertasi*, Semarang: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia & Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, "Petunjuk Teknis SPI 306".

Muhamad Nur Rokib, "Perlindungan Hukum Terhadap Penilai Publik pada Kontrak Pekerjaan Penilai Aset". *Disertasi*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Rizqi Nugraha Aulia Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Boyolali". *Disertasi*, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 596)

## **Putusan**

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2122 K/Pdt/2017

Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 192/Pdt.G/2016/PN.Arm

## **Website**

Central Intelligence Agency, "Indonesia". <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/> diakses pada 3 September 2024

Hotman Sidauruk, "Tanah Untuk Kepentingan Umum". <https://kppip.go.id/opini/tanah-untuk-kepentingan-umum/>. diakses pada 15 Oktober 2024

JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Pemberian Ganti Kerugian Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah". <https://jdih.maritim.go.id/infografis/pemberian-ganti-kerugian-pembebasan-kepemilikan-hak-atas-tanah> diakses pada 12 September 2024

Kementerian Keuangan, “Mengenal Experts”,  
<https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-anggaranperbendaharaan/berita/mengenal-experts340023#:~:text=ahli%20atau%20experts.,Secara%20umum%2C%20ahli%20adalah%20seseorang%20yang%20memiliki%20kekuatan%20untuk%20mengambil,memiliki%20gelar%20atau%20jabatan%20tinggi>, diakses pada 20 November 2024

Kementerian Keuangan, “Penilai Publik”,  
<https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/penilai-publik>, diakses pada 11 November 2024

Kementerian Keuangan, “Siapa sih Penilai Pemerintah dan Penilai Publik itu?”.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papualuku/baca-artikel/15173/Siapa-Sih-Penilai-Pemerintah-dan-Penilai-Publik-itu.html>, diakses pada 18 November 2024

Leks & Co, “Unsur-Unsur yang Digunakan Hakim dalam Permohonan Keberatan atas Besaran Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”. <https://blog.lekslawyer.com/unsur-unsur-yang-digunakan-hakim-dalam-permohonan-keberatan-atas-besaran-ganti-kerugian-dalam-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum/>, diakses pada 12 September 2024

Mekari, “Apa itu KJPP atau Kantor Jasa Penilai Publik?”.  
<https://klikpajak.id/blog/kjpp-kantor-jasa-penilai-publik/>, diakses pada 4 Oktober 2024

Portal Hukum Indonesia, “Pengertian Kepentingan Umum”.  
<https://suduthukum.com/2016/07/pengertian-kepentingan-umum.html>, diakses pada 19 Oktober 2024

Tjahjo Arianto, “Memahami Kasus Pulau Rempang”.  
<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/13/memahami-kasus-pulau-rempang>, diakses pada 8 September 2024

## **Kamus**

Rochaety, E., & Tresnati, R, Kamus Istilah Ekonomi (Edisi Kedua). (Indonesia: Bumi Aksara, 2022).

## **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Handoko, penilai publik, Bintaro, Tanggal 9 November 2024, pukul 11.30 WIB, Restoran Abuba Steak, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten.

